

Polarisasi Digital, Buzzer, dan Media Sosial Terhadap Perilaku Pemilih Muda di Indonesia (2021 - 2025): A Systematic Literature Review

¹Ifra Munira Arivin, ²Aminah, ³Fathur Rifqie

¹Department of Political Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Aceh, Indonesia

²Departemen of Political Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Banda Aceh, Aceh, Indonesia

3. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Correspondence Address: iframunira@mhs.usk.ac.id

Abstract

Young voters in Indonesia are currently heavily influenced by social media, the tendency of young voters to be used by buzzers to influence choices during elections. This study aims to synthesize empirical findings and systematically analyze, through the systematic literature review method with the PRISMA model on 9 selected articles from the 2021-2026 range, regarding digital polarization, the role of buzzers, and social media algorithms on young voter behavior. The results of the study show three major themes of digital polarization and social media social media campaigns, digital polarization and social media political engagement, and the influence of social media on young voter behavior. Therefore, this study can be concluded that strengthening digital literacy based on democratic values, harmonization of regulations that have been fragmented, and collaboration between the government, political institutions, digital platforms, and the young generation are strategic recommendations to suppress excessive polarization and build healthier and more quality political participation.

Keywords: *Digital Polarization, Buzzers, Social Media, Young Voters.*

Abstrak

Pemilih muda di Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh media sosial, kecenderungan pemilih muda tersebut dimanfaatkan oleh buzzer untuk memengaruhi pilihan saat pemilu. Penelitian ini bertujuan mensintesis temuan empiris dan menganalisis secara sistematis, melalui metode systematic literature review dengan model PRISMA terhadap 9 artikel terpilih dari rentang 2021-2026, mengenai polarisasi digital, peran buzzer, algoritma media sosial terhadap perilaku pemilih muda. Hasil kajian menunjukkan tiga tema besar polarisasi digital dan media sosial kampanye media sosial, polarisasi digital dan media sosial keterlibatan politik, pengaruh media sosial terhadap perilaku pemilih

muda. Oleh karena itu, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penguatan literasi digital berbasis nilai demokrasi, harmonisasi regulasi yang selama ini terfragmentasi, dan kolaborasi pemerintah, lembaga politik, platform digital, serta generasi muda menjadi rekomendasi strategis untuk menekan polarisasi berlebihan dan membangun partisipasi politik yang lebih sehat dan berkualitas.

Kata Kunci: *Polarisasi Digital, Buzzer, Media Sosial, Pemilih Muda.*

1. Intrduction

Polarisasi digital di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aktivitas buzzer dan peran media sosial sebagai platform utama interaksi politik, khususnya di kalangan pemilih muda. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial tidak hanya menjadi sumber informasi tetapi juga arena pertarungan narasi politik yang sering kali memperkuat sikap polarisasi. Polarisasi digital, buzzer, dan media sosial telah memperburuk pembagian opini di kalangan pemilih muda Indonesia, terutama Gen-Z yang mendominasi DPT Pemilu 2024 dengan 46,8 juta pemilih, melalui penyebaran hoaks dan kampanye emosional (Fau, 2025).

Buzzer, sebagai aktor yang secara sengaja menyebarkan pesan politik melalui media sosial, turut berkontribusi dalam membentuk opini dan perilaku pemilih muda yang rentan terhadap manipulasi informasi dan propaganda digital (Wulandari et al., 2024). Isu ini penting karena pemilih muda merupakan kelompok demografis yang kunci dalam menentukan arah politik masa depan Indonesia, namun mereka juga menjadi sasaran mudah dari penyebaran informasi yang biased, hoaks, dan kampanye yang terpolarisasi, yang dapat memengaruhi keputusan pemilihannya secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana polarisasi digital, kehadiran buzzer, dan penggunaan media sosial mempengaruhi dinamika perilaku politik pemilih muda di Indonesia.

Penelitian tentang polarisasi digital, buzzer, dan media sosial terhadap perilaku pemilih muda di Indonesia penting diteliti melalui literature review karena memungkinkan sintesis temuan terkini yang menunjukkan ancaman serius terhadap kohesi sosial dan demokrasi, seperti pembentukan *echo chamber* akibat algoritma yang memperkuat bias kognitif. Literature review dilakukan untuk mengidentifikasi celah pengetahuan, misalnya bagaimana polarisasi algoritmik di kota-kota besar seperti Jakarta mempercepat fragmentasi sosial dan erosi toleransi di kalangan pemilih muda yang intensif menggunakan media sosial. Polarisasi digital, buzzer politik, dan media sosial secara signifikan telah membentuk perilaku pemilih muda di Indonesia, dengan perbedaan mencolok sebelum dan setelah pemilu 2019 sebagai fenomena utama yang mempercepat dinamika ini. Studi literatur juga mendesak untuk mendukung rekomendasi kebijakan, seperti penguatan literasi digital berbasis nilai Pancasila guna meredam konflik identitas dan mempromosikan dialog inklusif di ruang digital.

Selain itu, review ini dapat mengonfirmasi. korelasi antara paparan konten partisan dengan penurunan partisipasi politik yang sehat, di mana 32% responden mengalami pertengkaran akibat konten politik digital, sehingga memberikan dasar empiris bagi intervensi platform dan Pendidikan (Setyarahajoe, 2015).

Polarisasi politik di Indonesia mengalami pertumbuhan eksponensial melalui media sosial, dimana buzzer memainkan peran sentral dalam memengaruhi pemilih muda berusia 18-24 tahun yang mencapai 22,85% dari total pemilih pada pemilu 2024. Algoritma platform seperti Tik Tok memperkuat fenomena ini dengan mengkurasi konten partisan di For Your Page (FYP), mendorong konsumsi informasi emosional daripada rasional, sehingga generasi z rentan terhadap echo chambers dan kampanye hitam-putih (Purboyo et al., 2025; Rahmania et al., 2025).

Dalam kajian sebelumnya terkait perkembangan politik sejumlah studi telah menyoroti tentang strategi pengembangan politik, artikel ini menggunakan mix method (Eliza et al., 2026). Penelitian lebih baru telah membahas mengenai peningkatan partisipasi pemilih publik pilkada, artikel ini menggunakan kualitatif (Iswanto & Pamungkas, 2024). Penelitian selanjutnya menegaskan penguatan partisipasi publik dalam pemilu Indonesia, artikel ini menggunakan metode library research (Awaluddin et al., 2022).

Namun, kajian diatas masih menunjukkan beberapa kekurangan yang menjadi gap penting untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian sebelumnya menggunakan mix method dan kualitatif. Oleh karena itu penelitin ini menggunakan sistematik literatur review dengan model PRISMA. Penelitian ini melengkapi kesenjangan pada aspek metodologi dan dapat memperkaya kajian mengenai polarisasi digital, buzzer dan media sosial terhadap pemilih muda di Indonesia (2021-2025).

Penelitian yang mengisi gap ini sangat penting untuk memberikan kontribusi konseptual dalam memperkuat kajian politik yang berkelanjutan. Penelitian ini berkontribusi dengan mensintesis bukti empiris periode 2021-2025 mengenai polarisasi digital, aktivitas buzzer, dan penggunaan media sosial terhadap perilaku pemilih muda di Indonesia, mengidentifikasi pola dan mekanisme pengaruh yang dominan, serta memetakan celah penelitian sebagai dasar bagi kajian selanjutnya dan rekomendasi kebijakan literasi politik digital.

2. Methods

Penelitian ini menggunakan metodologi systematic literature review dengan model PRISMA (preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses) (Moher et al., 2019) tentang polarisasi digital, aktivitas buzzer, dan penggunaan media sosial terhadap perilaku pemilih muda di Indonesia. Berikut adalah tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini.

1. Identifikasi (Identification)

Pencarian literatur dilakukan pada database Scopus dan Google Scholar. Kata kunci pencarian: ("digital polarization" OR "polarization" OR "division" OR "fragmentation") AND ("social media" OR "online platforms" OR "digital platforms" OR "social networks") AND ("young voters" OR "youth" OR "millennials" OR "generation z") AND ("voter behavior" OR "voting behavior" OR "electoral behavior" OR "political participation") AND ("influence" OR "impact" OR "effect" OR "persuasion"). Batasan waktu studi yang diterbitkan dalam rentang tahun 2021–2026 untuk memastikan relevansi dengan perkembangan politik terkini. Artikel ditemukan 106 artikel.

2. Penyaringan (Screening)

Penyaringan dilakukan berdasarkan judul dan abstrak, artikel yang tidak relevan dengan fokus pada dampak polarisasi digital, buzzer, dan media sosial terhadap perilaku pemilih muda di Indonesia dieliminasi. Kriteria inklusi meliputi sesuai dengan kata kunci dan topik, artikel jurnal akademik, Bahasa Inggris dan Indonesia, tahun 2021-2026. Kriteria eksklusi meliputi studi yang hanya membahas aspek teknis politik tanpa polarisasi digital, buzzer, dan media sosial terhadap perilaku pemilih muda di Indonesia, artikel non-akademik, dan publikasi dalam bahasa selain bahasa Indonesia dan Inggris, tahun publikasi selain 2021-2025.

Kriteria	Inklud	Esklud
Jenis publikasi	artikel jurnal akademik	artikel selain jurnal akademik
Topik	Kebijakan polarisasi digital, buzzer, dan media sosial terhadap pemilih muda di Indonesia	Selain topik kebijakan polarisasi digital, buzzer dan media sosial terhadap pemilih muda di Indonesia
Bahasa	Inggris dan Indonesia	Selain Bahasa Inggris dan Indonesia

Tahun	2021 - 2026	Selain tahun 2021-2026
-------	-------------	------------------------

Table 1. Kriteria eligibiliti

3. Kelayakan (Eligibility)

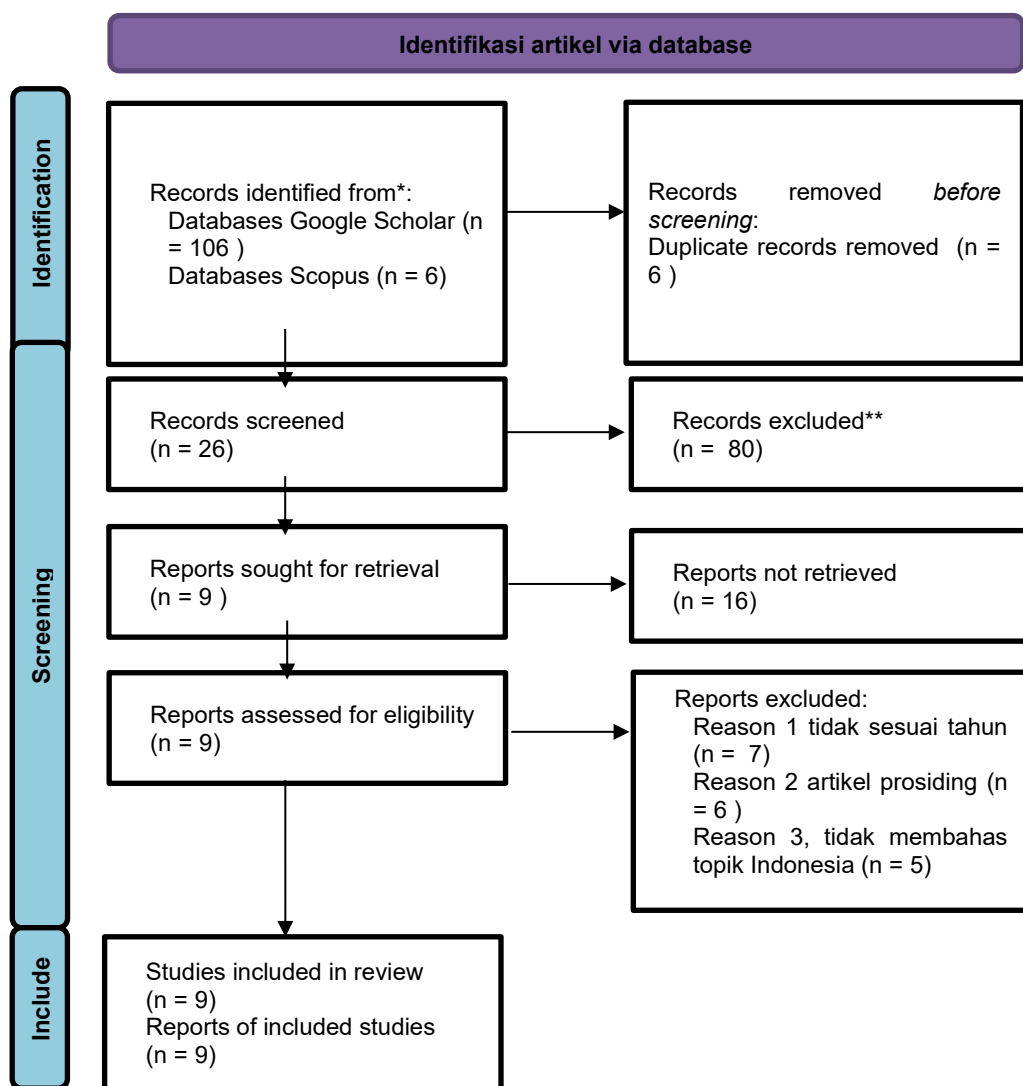
Penelaahan full-text artikel yang lolos seleksi awal dibaca secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan kriteria yang ditetapkan. Artikel yang layak dianalisis adalah 9 artikel. Pengelompokan studi, artikel dikelompokkan berdasarkan tema utama yaitu polarisasi digital, buzzer, dan media sosial terhadap perilaku pemilih muda di Indonesia kerangka inisiatif pemerintah, tantangan dalam implementasi kebijakan dan pengembangan politik.

4. Inklusi (Included Studies)

Studi yang memenuhi semua kriteria di atas dimasukkan dalam analisis akhir sebanyak 9 artikel. Data diekstraksi dan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi tema dan metodologi.

5. Visualisasi Proses PRISMA

Diagram alur PRISMA disusun untuk menggambarkan proses seleksi literatur mulai dari identifikasi, penyaringan, kelayakan, hingga inklusi studi akhir. Diagram ini memuat jumlah artikel yang ditemukan, disaring, dikeluarkan, dan dimasukkan dalam review.

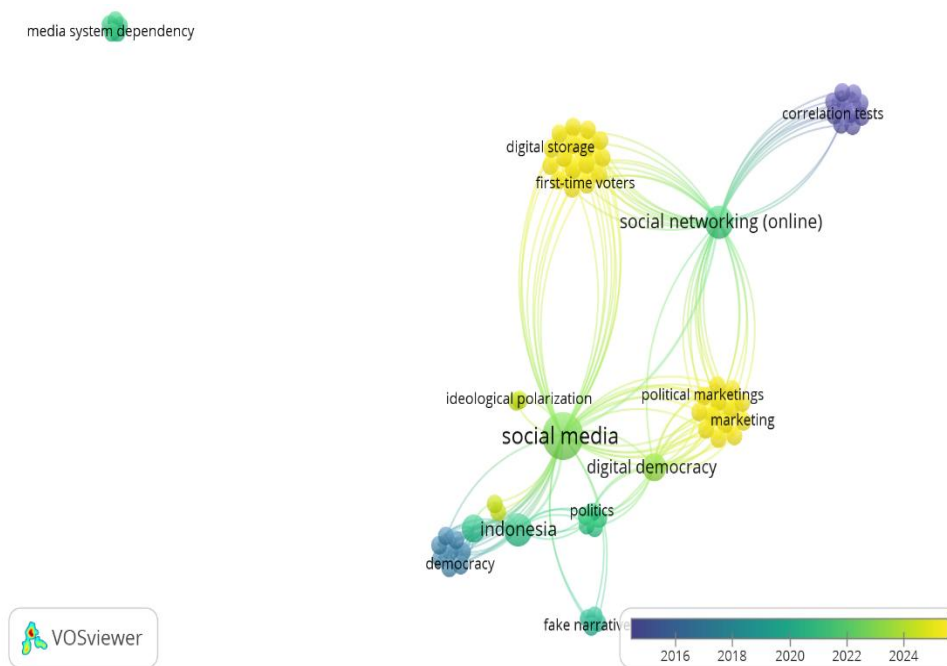


Gambar 1. Alur PRISMA (Author Analysis, 2026).

3. Results and Disscusion

Jaringan Penelitian dan Tren

Studi ini menyajikan jaringan dan kepadatan publikasi penelitian tentang Media Sosial dan Kampanye Pemilu dari tahun 2021 hingga 2026. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kata kunci yang terkait erat dengan polarisasi digital, buzzer dan media sosial terhadap pemilih muda di Indonesia.



Gambar 2. Pemetaan Jaringan berdasarkan Kata Kunci (Pengolahan Data, Penulis Menggunakan VOSviewer)

Gambar 2 menunjukkan diagram jaringan atau peta pikiran yang sangat kompleks yang mengilustrasikan hubungan yang saling terkait antara berbagai konsep polarisasi digital, buzzer dan media sosial terhadap pemilih muda di Indonesia. Gambar ini menyoroti poin-poin penting dari polarisasi digital, buzzer dan media sosial terhadap pemilih muda yang merupakan subjek utama studi ini. Berbagai node dengan ukuran berbeda dihubungkan ke node pusat melalui garis yang mewakili kekuatan atau hubungan antara konsep-konsep tersebut (Subekti dkk., 2023).

Setiap node dalam diagram diberi label dengan kata kunci tertentu, yaitu, satu yang terkait erat dengan kampanye pemilu melalui media sosial. Beberapa kata kunci yang terlihat antara lain Media Sosial, Digital Storage, Social Networking, Social Medium Campaign, Digital Democracy, dan Ideological Polarization. Setiap kata kunci memberikan arahan mengenai fokus penelitian dan area konseptual yang relevan. Berdasarkan analisis jaringan ini, konsep-konsep tersebut dapat dikelompokkan menjadi tujuh kluster analitis, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.

Cluster	Item tema
Cluster 1	Digital storage, electronic voting, fear of missing out, first time voter, fomo, information hub, least squares approxima, social medium literacy, subjective norm, theory of reasoned action
Cluster 2	Marketing, media campaigns, perceived behavioral, control, personal norm, political campaign, political marketing, social media campaign, technological dynamics
Cluster 3	Algorithm, democracy, election, electoral politics, electoral system, Indonesia, nationalism, racism, sectarianism, voting intention
Cluster 4	Correlation tests, election campaign, internet user, facebook pages, presidential candidates, presidential election, public opinions, social aspects, social nerwoking, websites
Cluster 5	Fake narratives, ideological polarization, Indonesian presidential election, Jakarta governor election, political polarization, social media
Cluster 6	Digital democracy, information technology, participation, politics, protests, youths
Cluster 7	Media system dependency, news use, political participation, voter, voting decision

Table 2. Cluster Analysis Results (Author Analysis, 2026).

Berdasarkan systematic literature review dengan model PRISMA terhadap literatur yang dipublikasikan antara tahun 2021 hingga 2026, penelitian ini mengidentifikasi beberapa temuan utama terkait Polarisasi Digital dan Media Sosial yaitu kampanye media social, keterlibatan politik, pengaruh media sosial terhadap

perilaku pemilih muda. Berikut adalah paparan data hasil analisis terhadap artikel yang telah memenuhi kriteria aligible.

No	Judul dan sitasi	Penulis	Jurnal	Indeks	Metodologi	Kontribusi
1	Polarisasi Politik Digital dan Erosi Sikap Demokrasi: Peran Identitas Sosial Politik pada Generasi Z. (Lutfiana et al., 2026).	Lutfiana, Ditya Ayu Ofiana, Yasya Ardiansyah, Randi Mulyani, Chindy Aprialia Ulfah, Khoiriya	Jurnal Media Akademik (JMA)	Non Sinta	SLR-PRISMA	Algoritma (filter bubble/echo chamber) memicu selective exposure. Identitas kaku memicu polarisasi afektif dan counter-engagement. Hasilnya erosi sikap demokrasi berupa labeling, sinisme struktural (politik dinasti, korupsi), dan slacktivism.
1	Industri Buzzer dan Polarisasi Politik di Era Digital: Perspektif Ekonomi Politik Media (Syadila et al., 2025)	Ayu Valysa Syadila, Masayu Syakira Quinna, Shofwah Hilyatul Auliya, Akhirul Aminullah	TUTURLOGI: Journal of Southeast Asian Communication P-ISSN: 2721-1495, E-ISSN:2721-0162 Vol. 6 No. 1 (2025).	Sinta 5	Literatur review	Model dan rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk memperkuat sector politik sehingga dalam meningkatkan aksesibilitas informasi politik dan keberlanjutan politik di tingkat nasional.
2	Young People and The Shadow of Populism: Reconsidering Democracy and Political	Alif Hasugian	Indonesian Journal of Political Studies Volume 5, Number 2, October 2025. 151-167	Sinta 5	Kualitatif deskriptif	Menjadi landasan empiris untuk pengambilan kebijakan yang menyesuaikan karakteristik identitas politik terbentuk dalam proses diskursif berhasil meningkatkan keterlibatan kaum muda, melalui penerimaan

	Transformation Indonesia. (Hasugian, 2025)					dan pertumbuhan populisme sebagai logika politik pembentukan identitas kolektif.
3	Authoritarian Nostalgia and Democratic Decline in Contemporary Indonesia (Kimura et al., 2024)	Ehito Kimura, Ratri Istania, Afrimadona, Rafif Pamenang Imawan, and Dimas Ramadhan	Journal of Current Southeast Asian Affairs	Scopus	Kuantitatif	Artikel ini menemukan bahwa nostalgia terhadap Orde Baru cukup luas di kalangan publik Indonesia, terutama pada kelompok usia yang mengalami langsung periode tersebut dan terutama terkait kenangan stabilitas serta kemakmuran ekonomi, meskipun rezim itu bersifat otoriter militer selama 32 tahun. Analisis menunjukkan bahwa nostalgia ini berkorelasi dengan dukungan yang lebih positif terhadap militer dan penerimaan yang lebih besar terhadap figur pemimpin kuat, sehingga berpotensi memperlemah komitmen terhadap norma dan praktik demokrasi kontemporer. Artikel ini menggunakan data survei opini publik Populi Center dan menerapkannya dalam kerangka studi opini publik kuantitatif untuk memetakan karakteristik, pola, dan mekanisme kerja nostalgia otoritarian dalam konteks kemunduran demokrasi Indonesia
4	Mitigasi Ekosistem Politik Destruktif: Upaya Generasi Muda Dalam Mengatasi Polarisasi Politik Berbasis Media Digital	Joey Dava Akbar Hanafiah Alby, Andika Pratama	Indonesian Journal of Political Studies Volume 4, Number 2, October 2024. 117-132	Sinta 5	Kualitatif	Rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi acuan penting dalam pembentukan dan pembaruan kebijakan pemerintah agar pengembangan politik dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pertumbuhan sosial dan kesejahteraan masyarakat

	(Alby et al., 2024)	Setiawan, Saila Rizqi Amalia Azhar				
5	Buzzer Media Sosial dan Pembentukan Perspektif Pemilih Millenial dalam Pemilu 2019 (Kurniawan et al., 2021)	Riko Kurniawan, Rizqi Yusuf Muliana, Fitri Maesaroh, M. Irvan Nurcahyo, Andreas Jati Kusuma	JPW (Jurnal Politik Walisongo) – Vol 3, No 1 021), 54-72	-	Kualitatif	Artikel ini memberikan rekomendasi reformasi politik dan penguatan kelembagaan agar pemilih muda dapat lebih optimal berkontribusi pada pertumbuhan partai politik yang berdaya saing dan berkelanjutan. Dengan demikian, artikel ini menjadi sumber penting untuk pengembangan dan pembaruan kebijakan pemerintah mengenai politikdi Indonesia.
6	Partisipasi Politik Generasi Z: Analisis Kritis terhadap Pengaruh Media Sosial dalam Pemilu 2024 (Nafisah & Bakhri, 2024)	Devina Ayu Nafisah, Syamsul Bakhri	Al-Fattāh: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 1 (2), 2024: 36-50 ISSN: 3064-1896	-	Literatur review	Penelitian ini menyoroti bagaimana dukungan kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi kendala akses politik internasional, pengembangan teknologi media digital, dan pembiayaan agar politik Indonesia mampu bersaing secara global. Dengan pemaparan data dan strategi yang terperinci, artikel ini menjadi sumber relevan yang dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan politik Indonesia khususnya di sector media digital.

7	Polarized Feeds: Three Experiments on Polarization, Framing, and Social Media (Banks et al., 2021)	Antoine Banks, Ernesto Calvo, David Karol, and Shibley Telhami	The International Journal of Press/Politics 2021	Scopus	kuantitatif	Artikel ini menguji apakah paparan terhadap tweet politik, khususnya yang bernada negatif, meningkatkan persepsi pemilih bahwa kandidat dan partai politik lebih terpolarisasi secara ideologis. Melalui tiga eksperimen survei, penulis menemukan bahwa tweet negatif tanpa konten kebijakan pun membuat responden melihat jarak ideologis yang lebih besar antar kandidat dan bahwa polarisasi meningkat seiring lamanya waktu pemrosesan pesan. Temuan ini menunjukkan bahwa framing di media sosial memiliki efek mandiri dalam memperkuat persepsi polarisasi, terlepas dari seleksi diri pengguna ke dalam komunitas sehaluan
8	Eksistensi Influencer dan Buzzer dalam Fenomena Golput Pada Masa Pemilu (Zuhdan & Enitasari, 2024)	Muhammad Zuhdan, Nisa Dwi Enitasari.	TheJournalish: Social and Government. Vol. 5 No. 4 (2024): Social and Government	Sinta 5	kualitatif	Artikel ini menyajikan rekomendasi penting untuk peningkatan koordinasi antar lembaga, dan perbaikan aspek legalitas guna menjamin kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini membantu mengarahkan pemerintah dalam menyusun dan memperbaiki kebijakan politik yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan, sekaligus menguatkan posisi Indonesia sebagai pusat politik dunia. Jadi,

						artikel ini memiliki kontribusi sangat penting bagi perumusan dan evaluasi kebijakan pemerintah terkait politik di Indonesia.
--	--	--	--	--	--	---

Tabel 3. Analisis artikel eligibility (Author Analysis, 2026).

Berdasarkan data diatas, dirumuskan beberapa tema utama dan sub tema. Tema utama meliputi polarisasi digital dan media sosial kampanye media sosial, polarisasi digital dan media social keterlibatan politik, pengaruh media sosial terhadap perilaku pemilih muda.

Tema 1. Polarisasi Digital dan Media Sosial: Kampanye Media Sosial

Indonesia memiliki peluang dan potensi besar untuk mengatasi polarisasi digital, didukung oleh populasi pengguna internet terbesar di dunia yang menjadi pasar utama. Posisi strategis Indonesia dalam ekosistem digital global semakin diperkuat oleh peningkatan literasi, regulasi, dan inovasi platform digital yang diakui internasional.

Sub tema 1.1 Demografi Pengguna Internet yang Dominan.

Indonesia memiliki populasi pengguna internet terbesar di dunia (86% dari 277,53 juta penduduk), menciptakan pasar domestik yang sangat besar untuk platform digital. Di lain pihak generasi Z (75,49 juta jiwa atau 28% dari total populasi) menunjukkan kesadaran tinggi terhadap literasi digital dan konsumsi informasi etis (poskita., 2025). Oleh karena itu, dengan populasi pengguna internet terbesar di dunia, Indonesia memiliki landasan kuat untuk mengembangkan kebijakan mengatasi polarisasi digital yang strategis dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang. Permintaan tinggi terhadap platform dan layanan digital di dalam negeri dapat diarahkan melalui regulasi, literasi, dan insentif ekonomi guna mendorong kualitas serta daya saing industri. Kebijakan yang tepat akan memperkuat inklusi digital, menarik investasi, dan menempatkan Indonesia sebagai pemain utama dalam ekosistem digital global.

Sub tema 1.2 Posisi Indonesia di Ekosistem Anti Polarisasi Digital Global

Indonesia telah mencatat prestasi membanggakan dengan menempati peringkat ke-1 sebagai negara dengan penetrasi internet tertinggi di Asia Tenggara dan ke-7 dunia pada 2024 (We Are Social & Meltwater, 2024). Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam membangun infrastruktur, regulasi, dan industri yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis prinsip digital inklusif (APJII, 2024). Keberadaan lembaga literasi digital yang kredibel seperti Kemkominfo serta dukungan pemerintah menjadi faktor kunci yang memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional. Indonesia memiliki cita-cita besar untuk menjadi pusat mengatasi polarisasi digital global sekaligus pusat inovasi konten inklusif dunia, dengan target yang sejalan dengan visi ekonomi digital nasional

dalam Rencana Strategis 2024-2028. Ambisi ini didukung oleh potensi sumber daya manusia, kreativitas, dan kekayaan budaya daerah yang mampu berpadu dengan nilai-nilai literasi digital (Kemkominfo, 2024). Pemerintah turut memperkuat langkah ini melalui kebijakan strategis seperti pengembangan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD), peningkatan regulasi konten, serta penguatan peran UKM dalam rantai pasok industri digital yang berdaya saing global (Kemenkop UKM, 2024). Menurut laporan Digital Economy Report 2024, Indonesia menempati peringkat ke-3 secara global dalam pertumbuhan pengguna media sosial (DataReportal, 2025), serta peringkat ke-1 ASEAN untuk adopsi platform digital (Google, Temasek & Bain, 2024). Capaian ini mencerminkan efektivitas kebijakan nasional dalam mendorong sinergi antara sektor keuangan digital, konten etis, dan pariwisata berbasis nilai inklusif. Melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, Indonesia terus memperkuat ekosistem digital yang inklusif, berkelanjutan, dan siap bersaing di tingkat global. Ekosistem industri digital melibatkan kolaborasi antara pelaku usaha, lembaga literasi digital seperti SAFEnet, dan konsumen yang memiliki kesadaran akan informasi etis (Maulidia et al., 2024; Sumarlin et al., 2024). Infrastruktur pendukung seperti riset konten digital, distribusi platform bersertifikasi, serta regulasi pemerintah seperti UU ITE yang mengatur standar digital menjadi pilar utama. Sinergi ini menciptakan rantai nilai yang berkelanjutan dan memperkuat kepercayaan pasar domestik dan global.

Tema 2. Polarisasi Digital dan Media Sosial: Keterlibatan Politik

Kerangka regulasi dan inisiatif pemerintah menjadi dasar penting dalam mengatasi fenomena buzzer di Indonesia, terutama melalui penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang direvisi. Melalui kebijakan ini, pemerintah membentuk Kominfo yang berperan dalam pengaturan, pengawasan, dan penindakan konten buzzer serta hoaks secara nasional. Sinergi antara Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, dan berbagai lembaga terkait lainnya memastikan pelaksanaan kebijakan anti-buzzer yang kredibel, transparan, dan mendukung daya saing demokrasi digital Indonesia di panggung global (Susanto, 2025).

Algoritma media sosial membentuk filter bubble dan echo chamber yang menyuburkan selective exposure, sehingga identitas sosial-politik pemilih muda mengeras dan memicu polarisasi afektif serta counter-engagement (Lutfiana et al., 2026). Kekakuan identitas ini rentan dieksploitasi oleh buzzer dan influencer melalui isu primordial dan pelabelan politik untuk mengikat loyalitas kelompok. Ketika dinamika tersebut bertemu dengan kekecewaan terhadap politik dinasti dan korupsi,

erosi sikap demokrasi muncul dalam bentuk labeling, sinisme struktural, dan slacktivism.

Sub tema 2.1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang direvisi menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 menetapkan perubahan penting dengan menjadikan pengawasan konten buzzer yang sebelumnya bersifat reaktif menjadi proaktif bagi pelaku usaha digital (Prasetyo et al., 2024). Ketentuan ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang mengatur penyelenggaraan informasi elektronik secara lebih komprehensif dan terstruktur (Nugroho et al., 2024). Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian atas ketersediaan informasi netral bagi masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan literasi digital dan daya saing bagi pelaku industri konten (Widodo, 2024).

Sub tema 2.2 Lembaga dan Koordinasi Anti Buzzer.

Badan Pengawas Konten Digital (Satgas Anti-Hoaks Kominfo) berperan sebagai badan pengatur utama yang berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Polri untuk memastikan pelaksanaan pengawasan buzzer berjalan efektif (Hidayat & Santoso, 2023). Dalam perkembangan regulasi, pembentukan Satgas Penanganan Hoaks dan Disinformasi sebagai nomenklatur baru menghadirkan dinamika baru dalam tata kelola informasi digital nasional (Prabowo & Wijaya, 2025). Keberadaan satgas ini menimbulkan pertanyaan dan perdebatan di kalangan pemangku kepentingan terkait peran, kewenangan, dan harmonisasinya dengan struktur kelembagaan yang telah ada.

Tema 3. Pengaruh Media Sosial terhadap Perilaku Pemilih Muda

Implementasi kebijakan yang mengatur pemanfaatan media sosial dan pengembangan ekosistem digital di Indonesia dihadapkan pada beragam tantangan yang menuntut kolaborasi lintas sektor dan konsistensi regulasi. Dinamika aturan yang kompleks dan sering kali berubah menimbulkan kebingungan, sementara kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya etika bermedia sosial, literasi digital, serta pencegahan polarisasi masih memerlukan penguatan kolektif agar ruang digital semakin sehat, berdaya saing, dan bermanfaat luas bagi publik (Kemkominfo, 2023; SAFEnet, 2022).

Sub tema 3.1 Fragmentasi dan Kompleksitas Regulasi.

Kerangka regulasi terkait media sosial di Indonesia masih terfragmentasi dan diwarnai oleh berbagai kebijakan yang saling tumpang tindih, seperti UU ITE, PP

71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Pedoman Etika Konten Digital yang dikeluarkan berbagai lembaga (Nasrullah, 2020; Kemkominfo, 2022). Kondisi ini mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi platform dan pengguna, khususnya dalam memenuhi standar moderasi konten, perlindungan data, dan penanganan ujaran kebencian maupun disinformasi (UNESCO, 2023). Tumpang tindih kewenangan antara kementerian, lembaga penegak hukum, dan otoritas penyiaran menyebabkan penanganan kasus di media sosial berjalan lambat dan kurang konsisten (Setiadi, 2021). Akibatnya, pengelolaan ruang digital dan upaya meredam polarisasi di Indonesia belum optimal dalam menjawab dinamika algoritma platform dan persaingan informasi global. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi menjadi langkah penting untuk menciptakan kepastian hukum dan memperkuat ekosistem media sosial nasional yang inklusif (Daud, 2024).

Ketidakjelasan mengenai pedoman penindakan konten yang melanggar, termasuk batasan antara kritik, ujaran kebencian, dan disinformasi, menimbulkan kebingungan bagi pengguna dan pelaku usaha digital dalam mengatur kepatuhan dan manajemen risiko mereka. Beberapa studi mencatat bahwa implementasi UU ITE kerap dinilai multitafsir dan menimbulkan rasa tidak aman dalam berekspresi di ruang digital (SAFEnet, 2022; Hadi, 2021). Kondisi ini mengharuskan pengguna, kreator konten, dan platform lebih adaptif dalam memahami regulasi, sekaligus mendorong pemerintah untuk memperkuat sosialisasi, transparansi, dan revisi kebijakan agar standar penegakan hukum di media sosial menjadi lebih jelas, proporsional, dan berpihak pada perlindungan hak digital masyarakat (Komnas HAM, 2023).

Sub tema 3.2 Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat

Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap etika digital berperan penting dalam membentuk perilaku online yang positif serta mendorong terciptanya ruang media sosial yang harmonis dan penuh nilai inklusif. Dalam konteks pengembangan ekosistem media sosial di Indonesia, tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penentu dalam tumbuhnya lingkungan digital yang sehat sekaligus berdaya saing secara global.

Sub Tema 3.3 Kesadaran dan Pemahaman Media Sosial

Pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai etika bermedia sosial tidak lagi terbatas hanya pada pemberitaan berita, tetapi juga dalam konteks verifikasi informasi, algoritma platform, hingga pencegahan polarisasi digital. Penggunaan media sosial berkembang seiring meningkatnya kebutuhan akan konten yang aman,

kredibel, dan sesuai nilai demokrasi, sehingga pengetahuan masyarakat terkait literasi digital sangat diperlukan (Kemkominfo, 2024). Penguatan literasi digital di masyarakat mendorong pengguna, kreator konten, dan pelaku usaha untuk memperhatikan pentingnya verifikasi fakta dan etika berbagi demi meyakinkan audiens serta memperluas akses ruang publik yang sehat (APJII, 2024; We Are Social, 2025).

Sub Tema 3.4 Pengaruh Kesadaran Terhadap Pengembangan Media Sosial di Indonesia.

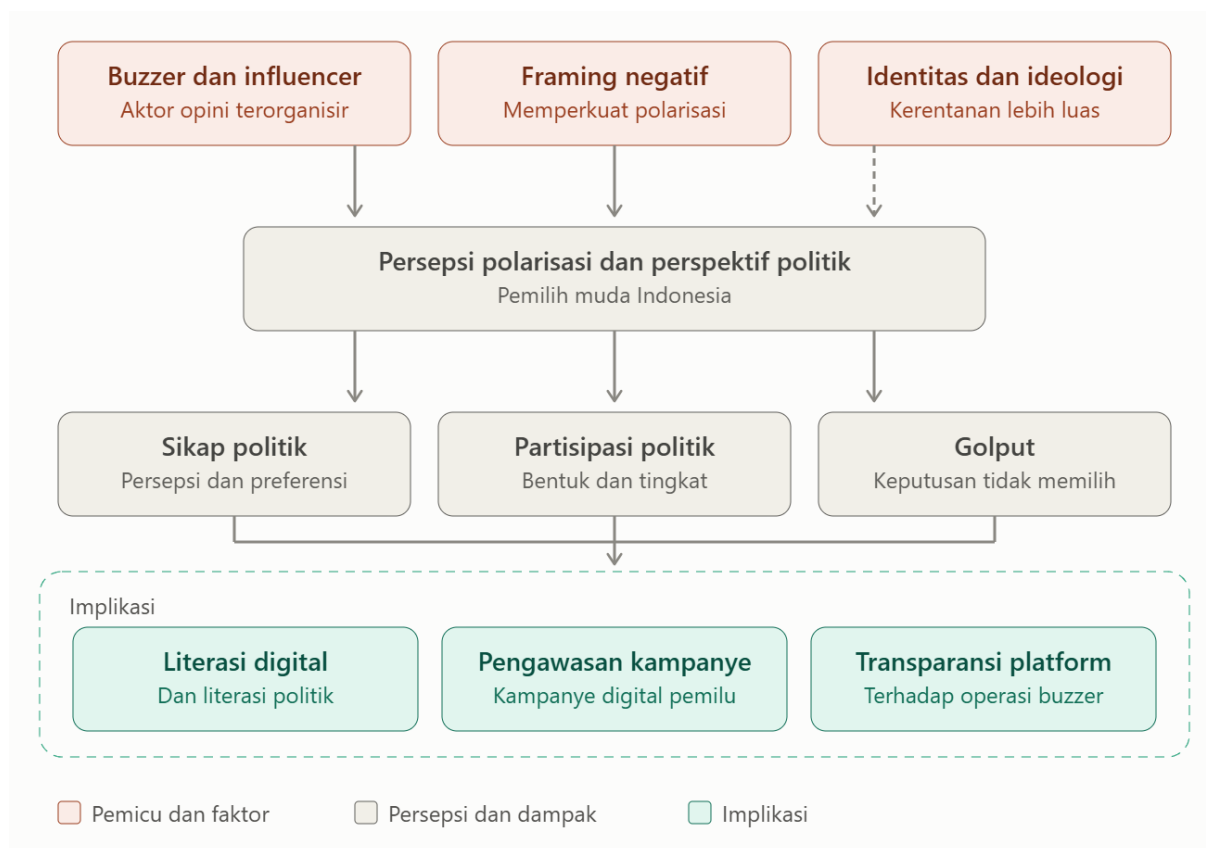
Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat akan literasi digital berbanding lurus dengan pengurangan polarisasi dan buzzer di media sosial, sebab pengguna yang sadar dan paham konsep etika digital cenderung lebih selektif dalam berbagi informasi serta mengutamakan verifikasi fakta dan inklusivitas (Kemkominfo, 2024; APJII, 2024). Pelaku konten dan buzzer yang memahami nilai demokrasi digital akan berinovasi dalam menciptakan narasi positif serta menjaga integritas informasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas diskursus publik dan daya saing demokrasi nasional di kancah global (We Are Social & Meltwater, 2025). Membangun kesadaran dan pemahaman etika digital serta literasi anti-polarisasi di masyarakat merupakan fondasi utama dalam mengembangkan ekosistem media sosial yang berkelanjutan dan membawa manfaat luas bagi berbagai lapisan Masyarakat (Bastian & Fitri, 2025; Nabila et al., 2022).

Indonesia, dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia (335 juta akun pada 2025), secara alami memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pemimpin global dalam mengatasi polarisasi digital dan buzzer (DataReportal, 2025). Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat untuk mewujudkan visi ini melalui serangkaian kebijakan dan inisiatif strategis (Kemkominfo, 2024). Dari revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memperkuat pengawasan konten buzzer, hingga peluncuran Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) 2023-2029, upaya sistematis terus dilakukan untuk membangun ekosistem digital yang sehat dan inklusif (Susanto, 2025). Namun, di balik peluang demokrasi digital yang menjanjikan dan dukungan regulasi, implementasi kebijakan ini tidak luput dari berbagai tantangan, mulai dari fragmentasi regulasi hingga hambatan yang dihadapi kreator konten independen dan komunitas digital. Menariknya, di tengah dinamika ini, muncul kekuatan pendorong baru: Generasi Z. Kelompok demografi yang melek digital ini (75,49 juta jiwa atau 28% populasi) tidak hanya menjadi pengguna yang kritis dan selektif terhadap informasi, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan yang secara

aktif membentuk preferensi konten dan mendorong inovasi dalam meredam polarisasi (Poskita.co, 2025). Oleh karena itu, memahami interaksi kompleks antara kebijakan pemerintah, tantangan implementasi, dan peran transformatif Generasi Z menjadi kunci untuk mengurai dinamika pengelolaan media sosial di Indonesia.

Meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan baik, implementasinya masih menghadapi kendala signifikan. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah seperti Kominfo, Polri, dan Bawaslu, perbedaan standar moderasi konten antar platform global, serta hambatan birokrasi menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas regulasi (SAFEnet, 2024). Kondisi ini menyebabkan potensi pengurangan polarisasi dan buzzer belum optimal dan menimbulkan ketidakpastian bagi kreator konten serta pengguna.

Temuan ini menegaskan perlunya pengembangan strategi kebijakan yang lebih terintegrasi dan koordinatif, dengan fokus pada harmonisasi standar moderasi konten, peningkatan kapasitas lembaga pengawas seperti Satgas Anti-Hoaks, serta pemberian insentif literasi digital yang tepat sasaran. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem media sosial secara berkelanjutan dan meningkatkan kontribusi sektor digital terhadap kualitas demokrasi nasional (UMJ.ac.id, 2025).



Gambar 3. Novelty (Author Analysis, 2026)

Conclusion

Hasil kajian sistematis ini menunjukkan bahwa buzzer dan framing di media sosial berperan dalam membentuk persepsi polarisasi dan perspektif politik pemilih muda Indonesia, sementara kerentanan mereka juga dipengaruhi faktor identitas dan ideologi politik yang lebih luas. Pola yang paling konsisten menunjukkan bahwa buzzer dan influencer berperan sebagai aktor terorganisir dalam membentuk opini, sementara framing negatif di media sosial memperkuat persepsi polarisasi, yang pada gilirannya berimplikasi pada sikap, partisipasi, dan keputusan untuk tidak memilih. Oleh karena itu, penguatan literasi digital dan literasi politik generasi muda, disertai pengawasan kampanye digital dan transparansi platform terhadap operasi buzzer, menjadi langkah yang relevan untuk menekan dampak negatif polarisasi pada Pemilu berikutnya. Studi ini terbatas pada rentang publikasi 2021–2026, basis data Google Scholar dan Scopus, dan fokus konteks Indonesia, sehingga belum menangkap dinamika terbaru di luar periode kajian maupun perbandingan lintas negara. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan desain kuantitatif, eksperimental, atau longitudinal pada pemilih muda Indonesia, serta memperluas kajian ke platform yang kini dominan seperti TikTok dan Instagram, agar hubungan antara buzzer, polarisasi, dan perilaku memilih dapat diukur secara lebih langsung.

REFERENCES

- Alby, J. D. A. H., Setiawan, A. P., & Azhar, S. R. A. (2024). Mitigasi Ekosistem Politik Destruktif: Upaya Generasi Muda Dalam Mengatasi Polarisasi Politik Berbasis Media Digital. *Indonesian Journal of Political Studies*, 4(2), 117–132.
- Awaluddin, Primayanti, A. D., & Salurante, B. D. (2022). Penguatan Partisipasi Pemilih dalam menghadapi Pemilu erentak Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah. *Maleo Law Journal*, 6(2), 233–241.
- Banks, A., Calvo, E., & Karol, D. (2021). PolarizedFeeds: Three Experiments on Polarization, Framing, and Social Media. *The International Journal of Press/Politics*, 26(4).
- Bastian, R. A., & Fitri, C. D. (2025). Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Perkembangan Industri Halal : A Sytematic Literature Review. *DesultanaH-Journal Education and Social Science*, 03(02), 95–104.
- Daud, Y. M. (2024). Perkembangan Kebijakan Pendidikan di Indonesia: A Systematic Leterature Review. *Intelektualita*, 13(1), 115–131. <https://doi.org/10.22373/ji.v13i1.24871>
- Eliza, M., Apriani, R., & Akhyar, T. (2026). Strategi Politik Meningkatkan Elektabilitas

- Pemilihan Calon Kepala Daerah pada Keterpilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Periode 2024 – 2029. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 6(1), 1–14.
- Fau, P. K. (2025). Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Gen Z Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 (Studi Kasus Pemilih Generasi Z di Universitas Kristen Indonesia). *JOURNAL OF GOVERNANCE AND SOCIAL ISSUES FISIP*, 4(2), 92–100.
- Hasugian, A. (2025). Young People and The Shadow Of Populism: Reconsidering Democracy and Political Transformation Indonesia. *Indonesian Journal of Political Studies*, 5(2), 151–167.
- Iswanto, D., & Pamungkas, D. B. (2024). Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2024 : Pendekatan Stakeholders Mapping Analysis. *Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP)*, 6(1), 15–27.
- Kimura, E., Istania, R., Afrimadona, Imawan, R. P., & Ramadhan, D. (2024). Authoritarian Nostalgia and Democratic Decline in Contemporary Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 43(3), 387–408. <https://doi.org/10.1177/18681034241252452>
- Kurniawan, R., Muliana, R. Y., Maesaroh, F., Nurcahyo, M. I., & Kusuma, A. J. (2021). Buzzer Media Sosial dan Pembentukan Perspektif Pemilih Millenial dalam Pemilu 2019. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 3(1), 54–72. <https://doi.org/10.21580/jpw.v3i1.9059>
- Lutfiana, D. A., Ofiana, Y., Ardiansyah, R., Mulyani, C. A., & Ulfah, K. (2026). Polarisasi Politik Digital dan Erosi Sikap Demokrasi: Peran Identitas Sosial Politik pada Generasi Z. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(6), 1–12.
- Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M., Gherzi, D., Liberati, A., Petticrew, M., Shekelle, P., Stewart, L. A., & Group, P.-P. (2019). Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (prisma-p) 2015 statement. *Japanese Pharmacology and Therapeutics*, 47(8), 1177–1185.
- Nabila, M., Lailatussaadah, & Nurmayuli. (2022). Implementasi Sistem Manajemen dalam Penginventarisasian sarana dan Prasarana Pendidikan di MTsN 4 Aceh Besar. *Ceudah Journal*, 1(March), 34–47.
- Nafisah, D. A., & Bakhri, S. (2024). Partisipasi Politik Generasi Z : Analisis Kritis terhadap Pengaruh Media Sosial dalam Pemilu 2024. *Al-Fattāh: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 1(2), 36–50.
- Purboyo, M. G., Amriwan, A., Tivantara, B. J., Putra, H. D., Ilmu, F., Politik, I., & Lampung, B. (2025). Ambivalensi Politik Digital : Algoritma , Gamifikasi , dan Polarisasi Generasi Z di TikTok. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 11(2), 172–190.
- Rahmania, S., Abdullah, M. N. A., & Mujayapura, M. R. R. (2025). Pengaruh Algoritma Tiktok Terhadap Regulasi Emosi Dan Kesehatan Mental Gen Z Dalam Fenomena

Quotes Sedih. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(September), 233–243.

Setyarahajoe, R. (2015). *Politik Digital: Transformasi Komunikasi Politik di Era Media Sosial*. Jakad Media Publishing.

Syadila, A. V., Quinna, M. S., & Auliya, S. H. (2025). Industri Buzzer dan Polarisasi Politik di Era Digital : Perspektif Ekonomi Politik Media. *TUTURLOGI: Journal of Southeast Asian Communication*, 6(1), 28–38.

Wulandari, C. D., Muqsith, M. A., Ayuningtyas, F., Ilmu, F., Politik, I., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2024). Fenomena Buzzer Di Media Sosial Jelang Pemilu 2024 dalam Perspektif Komunikasi Politik. *Avant Garde; Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(01), 134–146.

Zuhdan, M., & Enitasari, N. D. (2024). Eksistensi Influencer dan Buzzer dalam Fenomena Golput Pada Masa Pemilu. *TheJournalish: Social and Government*, 5(4), 420–440.